

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2022

1. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Indikator Kinerja Makro

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO	CAPAIAN KINERJA TAHUN N-1	CAPAIAN KINERJA TAHUN N	PERUBAHAN (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia	69,68%	70,28%	
2	Angka Kemiskinan	7,29%	6,59%	
3	Angka Pengangguran	2,25%	3,72%	
4	Pertumbuhan Ekonomi	3,33%	4,04%	
5	Pendapatan perKapita	41963.30	46091.44	
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,244	0,208	

A. Indeks Pembangunan Manusia

IPM Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2018 sampai tahun 2022 disajikan pada tabel berikut :

**Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018-2022**

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
(1)	(2)
2018	69,17
2019	69,67
2020	69,47
2021	69,68
2022	70,28

Sumber : Kabupaten Dalam Angka, 2023

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa IPM Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, berdasarkan hasil perhitungan, IPM tahun 2018 tercatat sebesar 69,17 kemudian pada tahun 2019 naik menjadi 69,67

dan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 69,47. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 69,68, dan pada tahun 2022 juga mengalami kenaikan menjadi 70,28.

B. Angka Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Sebagai informasi tambahan, digunakan hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar (SPKKD), yang dipakai untuk memperkirakan proporsi dari pengeluaran masing-masing komoditi pokok non makanan.

**Jumlah Penduduk Miskin dan garis Kemiskinan tahun 2018-2022
Kabupaten Lima Puluh Kota**

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (000)	Garis Kemiskinan (RP/Kap/bln)	% Kemiskinan
(1)	(2)	(3)	(4)
2022	26,00	504.670	6,59
2021	28,51	475.123	7,29
2020	26,43	451.295	6,86
2019	26,64	403.030	6,97
2018	26,46	388.689	6,99

Sumber : Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka, 2023

Berdasarkan tabel diatas terlihat jumlah penduduk miskin pada tahun 2021 sebesar 28,51 jiwa (dalam 000) atau setara dengan 7,29% dari jumlah penduduk, jika dibandingkan dengan tahun 2022, angka kemiskinan Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami penurunan (6,59% pada tahun 2022).

C. Angka Pengangguran (TPT)

Pengangguran terbuka merupakan bagian dari angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan baik bagi mereka yang belum bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah bekerja, atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang putus asa (merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan), dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan namun belum mulai bekerja. Angka pengangguran yang dinyatakan dalam persentase jumlah penduduk yang termasuk dalam kategori di

atas terhadap total angkatan kerja dan pengangguran yang menggunakan batasan tersebut di atas disebut Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Indikator ini akan menunjukkan keberhasilan program ketenagakerjaandaritahunketahun. Besarnya angka pengangguran terbuka mempunyai implikasi sosial luas karena mereka yang tidak bekerja tidak mempunyai pendapatan. Semakin tinggi angka pengangguran terbuka, maka semakin besar potensi kerawanan sosial yang ditimbulkan, seperti kriminalitas. Sebaliknya, semakin rendah angka pengangguran terbuka, maka semakin stabil kondisi sosial dalam masyarakat. TPT Kabupaten Lima Puluh Kota selama empat tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

TPT Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah
<i>1</i>	<i>2</i>
2022	3,72
2021	2,25
2020	3,03
2019	2,30
2018	2,73

Sumber : Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka, 2023

Berdasarkan tabel di atas TPT Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2022 adalah 3,72%. Hal ini menunjukkan bahwa dari 100 orang yang tergolong angkatan kerja, terdapat 4 orang yang sedang mencari kerja, mempersiapkan usaha, atau tidak mencari kerja karena putus asa.

D. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Perekonomian Lima Puluh Kota pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Lima Puluh Kota tahun 2022 sebesar 4,04%, sedangkan tahun 2021 sebesar 3,33%.

E. Pendapatan Per Kapita

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain, seperti rumah tangga, dan tenaga kerja. Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, maka disajikan data PDRB perkapita. Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota, di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan. Pada tahun 2021 Pendapatan per kapita / PDRB per kapita ADH berlaku sebesar Rp.41.963.300,- mengalami kenaikan dibanding tahun 2020 yang sebesar Rp.40.594.760,- sedangkan Pendapatan per kapita pada tahun 2022 sebesar Rp.46.091.440,-

F. Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini)

Gini ratio Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022 adalah 0,208, sedangkan Gini ratio Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021 adalah sebesar 0,244 yang artinya bahwa ketimpangan distribusi pendapatan relatif rendah. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang gini ratio sebesar 0,244 maka ketimpangan pendapatan mengalami penurunan pada tahun 2022. Semakin kecil *Gini Ratio* maka semakin kecil ketimpangan.

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tertuang di dalam dokumen perencanaan secara hierarki, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 yang kemudian setiap tahunnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), khusus yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 2005-2025, memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012-2032, RPJMD Propinsi Sumatera Barat, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMD

merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah yang disusun berdasarkan visi, misi, agenda, prioritas, dan program pembangunan.

2. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 sebagai berikut :

A. Urusan Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus Dilayani)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	SKPD Penanggung Jawab
I	Pendidikan Dasar		Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/Mi, SMP/Mts)	38,627	1 Tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.	Buku Teks Pelajaran	Jumlah peserta didik yang tidak mampu 1 paket per siswa per tahun	11,050	1 Tahun	
	2.	Perlengkapan Belajar	Jumlah peserta didik yang tidak mampu yang menerima perlengkapan belajar (buku tulis) per semester	71,550	1 Tahun	
	3.	Kualitas Tenaga pendidik (Kepala Sekolah) Yang Berkualifikasi S1/D-IV	Tepenuhnya standar minimal Tenaga pendidik(kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	326	1 Tahun	
	4.	Kualitas Tenaga Kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) Yang Berkualifikasi S1/D-IV	Terpenuhnya Tenaga Kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) Yang Berkualifikasi S1/D-IV	326	1 Tahun	
	5.	Jumlah Rombongan Belajar Di Satuan Pendidikan	Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	2,908	1 Tahun	
	6.	Satuan Pendidikan Yang Berakreditasi Minimal C	Jumlah satuan pendidikan yang terakreditasi	326	1 Tahun	
	7.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	Jumlah peserta penerima BOS pada Pendidikan Dasar	104	1 Tahun	
	8.	Kualitas Pendidik Yang Berkualifikasi S2/D-IV	Tepenuhnya kualitas pendidik yang berkualifikasi S2/D-IV	5,709	1 Tahun	
II	Pendidikan Kesetaraan		Jumlah Warga Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar Dan Atau Menengah Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan	1.295	1.243	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.	Modul Belajar	Jumlah warga belajar yang tidak mampu pertahun per paket	1,188	1 Tahun	
	2.	Perlengkapan Belajar	Jumlah warga belajar yang tidak mampu pertahun per semester	99	1 Tahun	

No	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus Dilayani)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	SKPD Penanggung Jawab
	3.	Jumlah Rombongan Belajar Di PKBM	Jumlah rombongan belajar di PKBM	67	1 Tahun	
	4.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	Jumlah warga belajar penerima BOP pertahun	8,099	1 Tahun	
	5.	Kualitas Pendidik Yang Berkualifikasi S1/D-IV	Jumlah pendidik yang berkualifikasi	279	1 Tahun	
	6.	Kualitas Tenaga Kependidikan (Kepala Sekolah) Yang Berkualifikasi S1/D-IV	Jumlah tenaga kependidikan (Kepala Sekolah yang belum memenuhi persyaratan kualifikasi	30	1 Tahun	
	7.	Kualitas Tenaga Kependidikan (Tenaga Admin/ Tenaga Lab/Admin Yang Berkualifikasi SMA/Sederajat	Jumlah tenaga kependidikan (admin/tenaga lab/admin yang belum memenuhi persyaratan kualifikasi	30	1 Tahun	
	8.	PKBM Terakreditasi Minimal C	Jumlah PKBM yang belum terakreditasi C	31	1 Tahun	
III	Pendidikan Anak Usia Dini				1 Tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.	Buku Gambar	Jumlah siswa PAUD yang kurang mampu penerima buku gambar kali 12 eksemplar per tahun	75	4 Tahun	
	2.	Alat Mewarnai	Jumlah siswa PAUD yang kurang mampu penerima alat mewarnai kali 2 kotak (minimal 12 warna) per tahun	75	4 Tahun	
	3.	Satuan Pendidikan Yang Berakreditasi Minimal C	Jumlah Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi C	281	1 Tahun	
	4.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	Jumlah peserta didik yang menerima BOP	8,099	1 Tahun	
	5.	Kualitas Tenaga Kependidikan (Kepala Sekolah) Yang Berkualifikasi S1/D-IV	Terpenuhinya standar minimal Tenaga Kependidikan (Kepala Sekolah) Yang Berkualifikasi S1/D-IV	290	3 Tahun	
	6.	Kualitas Pendidik Yang Berkualifikasi S1/D-IV	Tercapainya Pendidik Yang Berkualifikasi S1/D-IV	549	3 Tahun	
	7.	Jumlah Rombongan Belajar Di Satuan Pendidikan	Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan			

B. Urusan Kesehatan.

NO	INDIKATOR SPM	SASARAN (ORANG)	TARGET (%)
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	7,847	100
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	7,491	100
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	7,134	100
4	Pelayanan kesehatan balita	35,060	100
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	14,053	100
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	238,676	100
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	51,696	100
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	71,141	100

9	Pelayanan kesehatan penderita dm	2,614	100
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan ODGJ berat (psikotik)	830	100
11	pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis (TB)	12,630	100
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	9,110	100

C. Urusan Pekerjaan Umum

No.	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus Dilayani)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	SKPD Penanggung Jawab
I	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari		Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	2.370	2022	Dinas PUPR
	1.	Pelayanan SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari melalui jaringan perpipaan	2.370	1 Tahun	
	2.	Pelayanan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	-	-	-	
II	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik		Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	2.250	2021	Dinas PUPR
	1.	Pelayanan SPALD-S dengan kualitas Pelayanan Akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan dan memiliki kepadatan penduduk lebih kecil dari 25 jiwa/ha	Jumlah Warga Negara yang memperoleh akses sanitasi yang layak	2.250	1 Tahun	
	2.	Pelayanan SPALD-S dengan kualitas pelayanan akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk lebih besardari 25 jiwa/ha dan seluruh wilayah perkotaan	-	2.250	-	
	3.	Pelayanan Penyediaan prasarandan / atau jasa melalui SPALD-T dengan kualitas pelayanan akses aman penerima : masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-T	-	-	-	

D. Urusan Perumahan Rakyat

No.	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Batas Waktu Capaian (Tahun)
I	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi korban Bencana Kabupaten/kota		Jumlah Rumah Korban Bencana yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni		
	1.	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana		4	1 tahun
	2.	Pembangunan Kembali Rumah Bagi Korban Bencana		2	1 tahun
	3.	Pembangunan Baru di Lokasi baru/ relokasi Bagi korban Bencana		2	1 tahun
	4.	Bantuan Akses Rumah Sewa layak Huni Bagi Korban bencana		N/A	N/A
II	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintahan Daerah Kota		Jumlah Warga Negara yang terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni		
	1	Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan /atau Bangunan		N/A	N/A
	2	Subsidi Uang Sewa		N/A	N/A
	3	Penyediaan Rumah Layak Huni		N/A	N/A

E. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

• Satuan Polisi Pamong Praja

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target
I	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah yang harus dilayani	10.000 jiwa
		Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	1 jiwa
		Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	1 jiwa
		Standar Operasional Prosedur	1 dokumen
		Standar sarana dan prasarana Satpol PP	145 unit
		Standar peningkatan kapasitas anggota satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat	1.543 jiwa
		Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibun akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	10.000 jiwa

- **Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus Dilayani)	Persentase
1	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	36.080 jiwa	100 %
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan & kesiapsiagaan terhadap bencana	1.353 jiwa	100 %
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	180.403 jiwa	100 %

- **Dinas Pemadam Kebakaran**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus Dilayani)
I	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	
1.	Layanan penyelamatan dan evakuasi melalui pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak		82 kasus
2.	Layanan Pendataan, Inspeksi dan Investigasi dengan mengeluarkan surat keterangan korban kebakaran yang diperuntukkan bagi pengurusan surat berharga dan identitas kependudukan		28 kali

F. Urusan Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 %
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi social di luar panti	100 %

4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100 %
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100 %

3. OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota TA 2021 yaitu Opini atas Laporan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota belum di rilis oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

4. REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022

No	Jenis	2022		
		Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Realisasi/ Anggaran (%)
1	Pendapatan Asli Daerah	115.577.988.400,00	82.962.487.456,64	71,78
	a. Pajak Daerah	46.453.574.884,00	26.017.229.440,00	56,01
	b. Retribusi Daerah	7.669.369.360,00	3.100.697.678,00	40,43
	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.493.233.016,00	4.439.285.064,00	98,80
	d. Lain-lain PAD yang Sah	56.961.811.140,00	49.405.275.272,64	86,73
2	Pendapatan Transfer	1.184.180.181.664,00	1.129.886.494.559,00	95,42
	a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.109.150.733.000,00	1.057.218.580.783,00	95,32
	b. Pendapatan Transfer Antar Daerah	75.029.448.644,00	72.667.913.776,00	96,85
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	15.413.223.917,00	14.514.513.770,00	94,17
	a. Pendapatan Hibah	15.373.223.917,00	14.474.513.770,00	94,15
	b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00
	Total	1.315.171.393.961,00	1.227.363.495.785,64	93,32

5. REALISASI PENERIMAAN MENURUT JENIS PENERIMAAN DAN REALISASI PENGELUARAN MENURUT JENIS PENGELUARAN, DAN REALISASI MENURUT JENIS PEMBIAYAAN

Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

No	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.)
1.	Penerimaan Pembiayaan	
1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	21.768.707.385,-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	21.768.707.385,-
2.	Pengeluaran Pembiayaan	-

No	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.)
2.1.	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	1.500.000.000,-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.500.000.000,-
	Pembiayaan Netto	20.268.707.385,-



6. INOVASI DAERAH

NO	NAMA/JUDUL INOVASI DAERAH	LOKASI	SUMBER DANA		NAMA PENELITI/ INSTANSI/ LEMBAGA PENELITIAN	ABSTRAK/DESKRIPSI SINGKAT KAJIAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN YANG DILAKUKAN	KET.
			APBN/APBD	PENYANDANG DANA/ MANDIRI			
1.	E-SPJ Setda	Sekretariat Daerah	√		Bagian Keuangan	Penyusunan SPJ/kwitansi melalui aplikasi on line di lingkup internal Sekretariat Daerah	
2.	Elektronik Pendaftaran Izin Usaha Perikanan	Kabupaten Lima Puluh Kota	√		Dinas Perikanan	E-PIUP merupakan aplikasi yang digunakan untuk mempermudah proses pengurusan izin usaha perikanan bagi masyarakat /pelaku usaha perikanan terutama dalam hal pengiriman bahan - bahan kelengkapan izin untuk diterbitkan rekomendasi dari Dinas Perikanan, sehingga masyarakat yang tinggal di daerah yang cukup jauh bisa pengupdate data secara elektronik.	
3.	I-Ternak	Pasar Ternak Padang Siontah Kec. Situjuah Limo Nagari	√		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		

